

**SKRIPSI**

**UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MEMBANGUN  
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DI WONOKERTO  
KAPANEWON TURI SLEMAN**



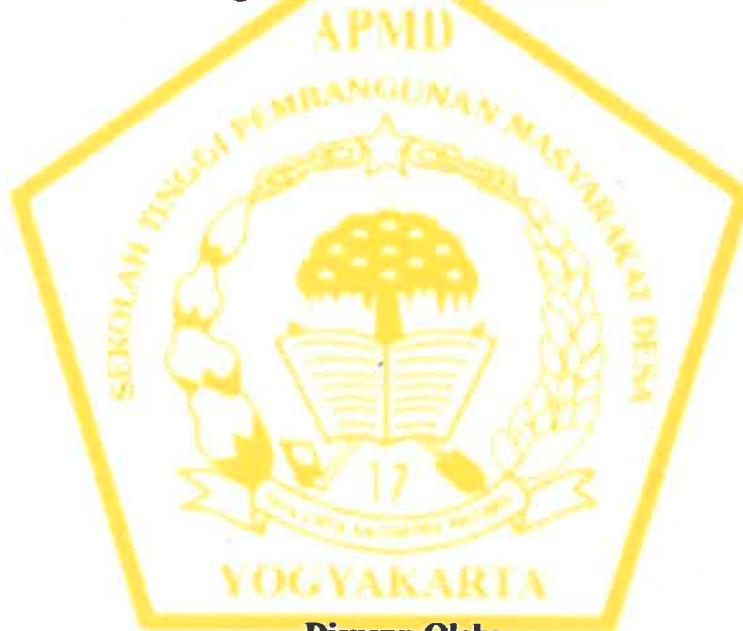
**Disusun Oleh:  
ANTON MESREY  
17520332**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2023**

**UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MEMBANGUN  
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DI WONOKERTO  
KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN.**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Disusun Oleh:**

**ANTON MESREY**

**NIM 17520332**






**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah Dipertahankan dan Disahkan di Depan Tim Penguji Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan  
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Hari : Jumat  
Tanggal : 20 Oktober 2023  
Pukul : 08.30 WIB.  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

NAMA	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing		
<u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Penguji Samping I		
<u>Drs.R. Yulianus Gatot, M.Si</u> Penguji Samping II		

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
(Dr. Rijel Samaloisa)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anton Mesrey

NIM : 17520332

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MEMBANGUN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DI WONOKERTO KAPANEWON TURI SLEMAN” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 29 September 2023



(Anton Mesrey)  
NIM: 17520332

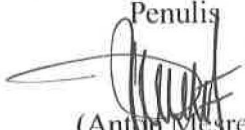
## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan limpahan rahmat-Nya, skripsi “UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MEMBANGUN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DI WONOKERTO KAPANEWON TURI, SLEMAN” selesai tepat pada waktunya. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu langkah awal guna mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Selain itu, pembuatan skripsi ini juga merupakan salah satu fasilitas bagi penulis guna mengukur keterserapan ilmu yang telah dipelajari selama di bangku kuliah. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih pada beberapa pihak yang telah berperan besar dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi, diantaranya:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr.Rijel Samaloisa. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberi masukan baik dalam penyusunan skripsi atau motivasi lainnya sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan lancar.
4. Kedua orang tua yang menjadi penyemangat penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari apabila dalam penyusunan skripsi masih mengalami kekurangan dalam berbagai hal yang diakibatkan oleh keterbatasan waktu, wawasan serta pengalaman. Oleh sebab itu, penulis secara terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga ke depannya penyusunan skripsi bisa lebih baik dan bermanfaat bagi khalayak luas.

Yogyakarta, 29 September 2023

Penulis  
  
(Anton Mesrey)  
NIM: 17520332

## **MOTTO**

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

(Matius 6 :33)

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan bukakan bagimu.

(Matius 7:7)

## PERSEMBAHAN

Penuh hikmat rasa syukur yang tak terhingga penulis haturkan kepada Tuhan Yang Mahas esa atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu(S1), Program Studi Ilmu Pemerintahan tepat waktu di kampus tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu dan dukung saya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materi maupun moral selama saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Oleh sebab itu, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Terima kasih Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan berkat, kesehatan, rezeki serta penyertaan dan perlindungan-Nya kepada saya selama berada di Yogyakarta.
2. Terima kasih kedua orang tua saya yang terkasih dan tercinta, Bapak Silas Mesrey, Bapak Almarhum Ruben Masokoda, dan Ibuku Yostina Mesrey, yang tersayang selalu memberikan dukungan doa, semangat serta nasehat kepada saya. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu yang selalu memberikan dukungan doa, semangat serta nasehat kepada saya. Semoga Bapak dan Ibu bangga dengan pencapaian saat ini.
3. Terima kasih Istriku tercinta Dorce Meidodga Serta anak Stevania Anisa Felikson Yosias Mesrey, yang selalu Memberikan dorongan, motivasi, senyuman, semangat, yang menguatkan saya dalam doa hingga penyusunan skripsi ini sehingga mencapai titik akhir.
4. Terima kasih Kepada kakak tersayang Adiana Mesrey, Yance Mesrey, Meriam Mesrey, Semi Orocomna yang selalu membantu setiap kesusahan saya selama menempuh Ilmu di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu pendorong dan memberikan semangatku, support baik sehingga saya bisa sukses.
6. Terima kasih adik Mariana Sumuy dan adik Agustinus Sumuy yang telah mendorong saya dengan susah selama kuliah.
7. Dan kepada orang –orang terdekatku yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
8. Serta tidak lupa pula Almamater tercinta sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa “APMD”Yogyakarta yang saya banggakan.
9. Terima kasih kepada teman-teman IPMA-TB yang selalu membantu saya saat susah waktu kuliah semoga Tuhan Yesus yang membalas kebaikan teman-teman semua di mana berada.

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Pemerintah dalam membangun BUMKAl agar dapat berjalan dengan baik di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Sleman. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAl) di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Sleman merupakan salah satu Usaha Milik Kalurahan guna menyalurkan inisiatif masyarakat, mengembangkan potensi, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalanannya, BUMKAl kalurahan Wonokerto tidak dapat beroperasi secara optimal dan bahkan pada tahun 2019 dapat dinyatakan BUMKAl kalurahan Wonokerto mengalami mati suri. Mengingat arti penting BUMKAl untuk mendukung kesejahteraan masyarakat maka pihak pemerintah kalurahan Wonokerto melakukan berbagai macam usaha untuk menghidupkan kembali BUMKAl kalurahan Wonokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Informan pada penelitian ini adalah Lurah, Carik, Dukuh, Pamong Kalurahan, Ketua BUMKAl, Ketua RT dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini bersifat induktif dengan tiga langkah utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Dalam Membangun BUMKAl Wonokerto untuk menghidupkan kembali BUMKAl Dharma Utama yaitu membentuk pengurus baru, memberikan kewenangan penuh pada ketua BUMKAl dan memberi kewenangan BUMKAl untuk mengelola potensi yang ada. Proses komunikasi dilakukan dengan menciptakan perantara yakni oleh dukuh dan ketua Rt. Seluruh kebijakan yang dilakukan oleh BUMKAl menggunakan 4 konsep utama yaitu adanya peningkatan kehidupan dalam masyarakat, menciptakan keadilan, memberikan peluang masyarakat untuk aktif berpartisipasi, serta menjamin adanya pengembangan yang berkelanjutan. AD/ART BUMKAl Dharma Utama berfokus pada teknis mengelola organisasi dan bisnisnya, ketentuan tentang keanggotaan, hingga berbagai hal yang terkait dengan pembubaran serta peraturan khusus lainnya.

**Kata Kunci:** Upaya Pemerintah Kalurahan dalam Membangun BUMKAl, di Kalurahan Wonokerto.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>INTISARI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Kontribusi Penelitian .....	10
1. Tujuan .....	10
2. Manfaat .....	11
E. <i>Literatur Review</i> .....	11
F. Kerangka Konseptual.....	14
1. Rekrutmen.....	14
2. Kinerja .....	21
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) .....	22
4. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) .....	26
5. Pemerintah Desa .....	28
G. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian .....	34
2. Unit Analisis .....	35
3. Teknik Pengumpulan Data .....	36
4. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB II PROFIL KALURAHAN WONOKERTO</b> .....	39
A. Sejarah Kalurahan Wanokerto.....	39
B. Kondisi Geografis.....	40

1. Batas Administrasi .....	40
2. Kondisi Fisik Wilayah .....	41
3. Kondisi Topografi.....	42
4. Kondisi Demografi.....	43
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	45
7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	45
8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	46
9. Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	46
C. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi .....	47
1. Kondisi Sosial .....	47
2. Kondisi Budaya.....	47
3. Kondisi Ekonomi .....	49
D. Kondisi Sarana dan Prasarana .....	53
1. Pendidikan .....	53
2. Fasilitas Kesehatan.....	55
3. Fasilitas Peribadatan .....	56
4. Fasilitas Perekonomian .....	57
5. Fasilitas Pemerintah dan Pelayanan Umum .....	58
E. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan.....	59
<b>BAB III UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MEMBANGUN</b>	
<b>BUMKAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DI WONOKERTO .....</b>	<b>63</b>
A. Permasalahan BUMKAl Wonokerto pada Masa Lalu .....	63
B. Upaya Pemerintah Kalurahan Wonokerto untuk Menghidupkan Kembali BUMKAl	64
C. Proses Komunikasi Antara Pemerintah Kalurahan Wonokerto dengan Warga.....	70
D. Aturan Tentang BUMKAl Kalurahan Wonokerto .....	73
1. Kebijakan Pemerintah Kalurahan Wonokerto Tentang BUMKAl.....	73
2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMKAl .....	85
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Data Informan Kalurahan Wonokerto .....	35
Tabel II.1. Pembagian Wilayah Padukuhan, RW dan RT Kalurahan Wonokerti	41
Tabel II.2. Penggunaan Lahan Kalurahan Wonokerto.....	42
Tabel II.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel II.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	45
Tabel II.5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	45
Tabel II.6. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	46
Tabel II.7. Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	46
Tabel II.8. Potensi Ekonomi di Kalurahan Wonokerto.....	51
Tabel II.9. Jumlah dan sebaran fasilitas Pendidikan .....	54
Tabel II.10. Jumlah dan Sebaran Fasilitas Kesehatan.....	55
Tabel II.11. Jumlah dan Sebaran Fasilitas Peribadatan.....	56
Tabel II.12. Jumlah dan Sebaran Fasilitas Perekonomian .....	57
Tabel II.13. Jumlah Sebaran Fasilitas Pemerintah dan Pelayanan Umum.....	38
Tabel II.14. Daftar Nama Pemeritahan Kalurahan Wonokerto.....	59
Tabel II.15. Daftar Anggota BPD Wonokerto .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Bagan Struktur Organisasi BUMKal “DHARMA UTAMA” Kalurahan Wonokerto.....	61
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan Pemerintahan yang menyimpan banyak potensi alam dari sektor pariwisata Desa. Pemerintah Desa punya banyak kekayaan alam yang melimpah di Negara Indonesia memiliki seperti berbagai potensi sumber daya alam yang cukup baik untuk kelola. Menjadi salah satu Desa di setiap Indonesia memiliki sektor penghasilan di perkebunan salak, cabai, sayuran, singkong, pisang, Desa wisata, pantai, danau, sungai, embun, tambang emas.

Desa kondisi tanah yang subur, memadai maupun masyarakat petani mereka mata pencaharian itu berkebun salak, untuk Ekspor impor ke setiap daerah maupun Negara lain. Pemerintah Desa punya kewenangan untuk pembinaan masyarakat dalam pengelolaan Potensi alam yang ada di Desa secara baik. untuk meningkatkan ekonomi di Desa maupun seluruh Negara Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Desa dan (BPD) membentuk Pengurus BUMKAL untuk memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam tersebut yang ada di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Desa adalah Pemerintah Desa itu terdiri atas kepala desa, sekretaris Desa, perangkat Desa, harus punya hak, dan kewenangan,

pengawasan yang penuh untuk mengatur dan megurus urusan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat Desa disekitarnya. Pemerintah Pusat Transfer dana ke kas Pemerintah Desa guna untuk menyelenggarakan Pembangunan Desa, mensejahterakan masyarakat Desa, Dana diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat Desa. Disisi lain juga melakukan kewenangan yang sebesar - besarnya untuk mengontrol, pengawasan terhadap taraf hidup masyarakat Desa, guna mendorong pembangunan Badan Usaha Milik Kalurahan di setiap kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Maka upaya Pemerintah Kalurahan dalam membangun Badan Usaha Milik Kalurahan untuk guna mengelola potensi-potensi alam yang ada di Kalurahan. seperti yang kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa merupakan masyarakat, hak asal usul, dan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Ketika Kita melihat Secara langsung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta banyak potensi alam, Sangat antusias, kemajuan perubahan besar dalam pembangunan Badan Usaha Milik Kalurahan. Melalui destinasi Desa wisata, kekayaan alam yang lain beragam unik dikalurahan Wonokerto melihat perubahan besar mendorong/ mendobrak peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan itu

kota Yogyakarta juga terkenal dengan kota wisata, pelajar, kota sosial Budaya, pesona alam, bisnis, budaya sosial masyarakat juga optimalkan masyarakatnya juga dengan baik, sebagai sumber potensi kepariwisataan dalam artian masyarakatnya Yogyakarta. Guna mampu kelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) yang ada Sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, Karena lihat Pengetahuan daya berpikir secara wirausaha sangat memadai lebih baik, maju, sejahtera. Maka maju, mandiri, kuat, Desa wisata, sosial budaya, edukasi, alam atau bentuk lainnya. Kalurahan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah yang berasal dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian upaya pemerintah kalurahan dalam pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi. pemerintah kalurahan dibentuk ketua BUMKal Tujuan. Guna mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Oleh karena itu, lembaga perekonomian untuk mendobrak pemerintah Kalurahan supaya percepatan pembangunan kepada masyarakat miskin, Mendorong kemajuan Kalurahan pengurus lembaga –lembaga BUMKal untuk pengawasan potensi yang ada Kalurahan Tersebut. Musyawarah Kalurahan (Muskal), adalah Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah guna untuk sosialisasi evaluasi bersama pemerintah kalurahan untuk mendorong gerakan membangun ekonomi Desa melalui

kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategis dalam mengembangkan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat ekonomi Lemah. Kewirausahaan Desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat Desa setempat.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka masyarakat dan pemerintah desa mendapatkan kewenangan yang luas untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga memberikan eksistensi desa secara normatif menjadi lebih kuat baik dari aspek kedudukannya, kewenangannya, pendanaannya, pembangunannya dan sebagainya. Tentu hal tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, yang selama ini dipandang oleh sebagian orang sebagai daerah tertinggal dan daerah penuh dengan kemiskinan dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di kalangan sebagian orang ada yang melihatnya berbeda atau kata lain mereka masih memandang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini hanya berbicara dari segi pembangunan infrastruktur dan dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat, namun mereka tidak memandang bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir bukan hanya sekedar tentang pembangunan infrastruktur atau dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat.



Seperti Pasal 18 yang berbicara tentang Kewenangan Desa, yaitu Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa dan Pasal 26 kepala desa ayat (1). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ayat (2) huruf h membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; dan ayat (2) huruf i. mengembangkan sumber pendapatan desa, (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Jika analisis dengan baik tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, seperti pasal 18 tentang Kewenangan Desa, dan Pasal 26 tentang Penyelenggara Pemerintah Desa atau Kepala Desa seperti penjelasan di atas, maka akan kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya bicara persoalan pembangunan infrastruktur dan dana desa yang ditransfer dari pemerintah pusat saja, melainkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, mendayagunakan masyarakat desa, untuk menuju kemandirian desa.

Sama halnya seperti yang tertuang pada bab X Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, seperti pada Pasal 89 Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk: huruf a. pengembangan

usaha; dan huruf b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini mengemukakan bahwa desa mandiri digambarkan sebagai desa independen yang mampu mengolah sumber daya alam menjadi suatu yang bernilai guna dengan menggunakan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing. Kemandirian tersebut dapat dituangkan melalui BUMDesa. BUMDesa adalah lembaga keuangan yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Keberadaan lembaga ini ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui pengelolaan sumber daya yang ada di desa. BUMDesa, tidak hanya memiliki fungsi di sektor ekonomi namun juga di sektor sosial, diantaranya adalah dengan melakukan pendampingan usaha kepada para pelaku usaha desa dan berkontribusi memberikan pendapatan asli desa atau dikenal dengan PADes yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah desa untuk membangun desa. Selain itu juga BUMDesa bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemajuan desa.

Pendirian BUMDesa merupakan inisiatif dari masyarakat dan dimusyawarahkan dalam musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapat persetujuan bersama. Peranan pemerintah daerah masih dominan, hal ini dapat dipahami karena pendirian BUMDesa merupakan lembaga baru yang belum banyak dikenal masyarakat desa, manajemen bisnis yang tidak semata mencari keuntungan bisnis tetapi juga

memperhatikan keselarasan sosial, dan pengelolaannya perlu pengaturan dan sinkronisasi antara bisnis dan masalah sosial. pendirian BUMDesa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Pembentukan BUMDesa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. mengemukakan bahwa keberadaan BUMDesa menjadi salah satu pertimbangan menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDesa (Sari & Arisena, 2023).

Melihat penjelasan di atas BUMDesa memiliki peranan yang sangat penting untuk memajukan masyarakat desa dan pembangunan desa, guna untuk kemandirian desa. Sehingga untuk terwujudnya badan usaha milik desa atau (BUMDesa) tidak serta merta langsung didapatkan dari Desa, namun dibutuhkan pemerintah desa dan pengurus BUMDesa yang memiliki kapasitas dalam mengelola sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang baik untuk dikelola. Namun sejauh ini di beberapa desa di Indonesia tidak memiliki pengurus BUMDesa yang kreatif, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Realitanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit

usaha yang dibangunnya, masih jauh dari harapan.

Hal ini disebabkan karena Pemahaman perangkat desa terutama Kepala Desa mengenai BUMDesa masing sangat kurang. Ini terjadi karena Kepala Desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggung jawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDesa yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDesa itulah yang membuat wacana BUMDesa tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa sehingga konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai „prestasi“ karena ada bentuk fisik yang terlihat.

Disisi lain yang menjadi masalah pokok dalam pengelolaan BUMDesa yang tidak berjalan dengan baik akibat dari tata cara rekrutmen pengurus yang kurang profesional yang mengakibatkan kemunduran. Di sisi lain krisis sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab utama pembangunan desa kurang berkembang terutama dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDesa. Banyak usaha yang dikelola BUMDesa tidak berjalan atau bahkan terhenti dikarenakan permasalahan pengurus BUMDesa. Oleh karena itu, diperlukan proses rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia secara profesional agar memperoleh SDM yang berkualitas untuk mengelola BUMDesa. Proses rekrutmen dilakukan secara internal sehingga menghasilkan dua belas calon pengurus BUMDesa untuk diseleksi lebih

lanjut melalui tes dan wawancara. Hasil rekrutmen menetapkan tiga orang pelamar sebagai ketua, sekretaris dan bendahara BUMDesa, serta tujuh orang pelamar menjadi anggota BUMDesa, sedangkan dua pelamar tidak masuk ke dalam kepengurusan BUMDesa (Lestari, et al., 2021).

Pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa penyebab tidak berjalannya Badan Usaha Milik Desa diakibatkan karena ketidaktahuan dari Perangkat Desa atau Kepala Desa, juga persoalan pemerintah kalurahan terhadap pengurus BUMKal yang tidak dilakukan secara profesional. Sehingga dalam penelitian ini peneliti juga ingin melakukan penelitian di Kalurahan Wonokerto untuk mengetahui dan mencari tahu faktor-faktor penyebab dari vakumnya Badan Usaha Milik Kalurahan Wonokerto. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan pentingnya perubahan dalam artian mendobrak pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam mengaktifkan kembali BUMKal yang ada di Kalurahan Wonokerto, maka peneliti merasa perlu untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Upaya Pemerintah Kalurahan Dalam Membangun BUMKal di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman”” Karena seperti yang kita ketahui dalam Undang-Undang Desa seluas-luasnya memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Desa agar membangun kesejahteraan masyarakat melalui pendanaan untuk menghidupkan BUMKal menjalankan roda pemerintahannya di Kalurahan.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, gunakanlah indikator-indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Fokus Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pemerintah Kalurahan dalam membangun BUMKal di Kalurahan Wonokerto
2. Bagaimana Proses Komunikasi Pemerintah di Kalurahan Wonokerto dengan Warga,

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti ingin menggali penyebab matinya BUMKal Yaitu Bagaimanakah “Upaya Pemerintah Kalurahan Dalam Membangun Badan Usaha Milik Kalurahan di kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman?

## **D. Tujuan dan Manfaat Kontribusi Penelitian**

### **1. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Pemerintah Kalurahan dalam membangun Badan Usaha Milik Kalurahan agar dapat berjalan dengan baik di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Sleman.

## 2. Manfaat

- a. Manfaat akademis untuk memberikan evaluasi atau catatan terhadap pengelolaan BUMKAL kepada Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Sleman.
- b. Manfaat praktis adalah penelitian ini bisa menjadi contoh bagi Desa-Desa lain dalam memanfaatkan pengelolaan BUMKAL yang baik.

### *E. Literature Review*

*Literature review* adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduktibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi.

1. Nur, M. A. (2021:162). Pengaruh rekrutmen dan seleksi terhadap komitmen organisasional dimediasi oleh kepuasan kerja: Studi kasus karyawan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabanan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Manajemen sumber daya manusia merupakan aspek penting yang harus dijalankan dengan baik oleh sebuah perusahaan. Beberapa indikator yang terdapat dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu rekrutmen, seleksi, komitmen organisasional, dan kepuasan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk menguji pengaruh rekrutmen terhadap kepuasan kerja pada Karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Kabupaten Tabanan, 2. Untuk menguji pengaruh seleksi terhadap kepuasan kerja pada Karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Kabupaten Tabanan, 3.

Untuk menguji pengaruh rekrutmen terhadap komitmen organisasional pada Karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Kabupaten Tabanan, 4. Untuk menguji pengaruh seleksi terhadap komitmen organisasional pada Karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Kabupaten Tabanan, 5. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional pada Karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Kabupaten Tabanan 6. Untuk menguji pengaruh rekrutmen terhadap komitmen organisasional melalui kepuasan kerja pada Karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Kabupaten Tabanan, 7. Untuk menguji pengaruh seleksi terhadap komitmen organisasional melalui kepuasan kerja pada Karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Kabupaten Tabanan.

2. Pada penelitian terdahulunya oleh Sari dan Arisena dalam (Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 04 No 01 April 2023 (1-26 Proses Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Di Kabupaten Bangli) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga keuangan desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat. Keberadaan BUMDesa diharapkan dapat menggali potensi dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat desa yang akan memperbaiki perekonomian desa. Proses pembentukan dan pengelolaan BUMDesa harus berjalan dengan baik. Pengelolaan BUMDesa yang baik akan berdampak baik bagi pemerintah desa yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) akan membantu proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Terdapat 17 BUMDesa yang berdiri di tiga Kecamatan di Kabupaten Bangli. Penelitian ini



bertujuan untuk: 1). mengidentifikasi karakteristik, 2) menganalisis proses pembentukan, 3) menganalisis pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Bangli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan ditentukan dengan metode sensus, data penelitian diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BUMDesa di Kabupaten Bangli sebagian besar sudah menjalankan usahanya selama 3-5 tahun. Sebagian besar jenis usaha yang dijalankan adalah usaha bisnis keuangan (*financial business*), jumlah karyawan BUMDesa dipengaruhi oleh jenis bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDesa.

3. Pada penelitian terdahulunya oleh Setiawan et al dalam (SULUH: Jurnal Abdimas, proses dan hasil rekrutmen sumber daya manusia pada BUMDesa rancabango garut Vol.2 No. 2 (February 2021) hal:117 -127) tentang Krisis sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab utama pembangunan desa kurang berkembang terutama dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDesa. Banyak usaha yang dikelola BUMDesa tidak berjalan atau bahkan terhenti dikarenakan permasalahan pengurus BUMDesa. Oleh karena itu, diperlukan proses rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia secara profesional agar memperoleh SDM yang berkualitas untuk mengelola BUMDesa. Proses rekrutmen dilakukan secara internal sehingga menghasilkan dua belas calon pengurus BUMDesa untuk diseleksi lebih lanjut melalui tes dan wawancara. Hasil rekrutmen menetapkan tiga orang pelamar sebagai ketua, sekretaris dan bendahara BUMDesa, serta tujuh orang pelamar menjadi anggota BUMDesa, sedangkan dua pelamar tidak masuk ke dalam kepengurusan BUMDesa.

4. Zikri, A. (2019:115-139). Pengaruh Rekrutmen Terhadap Kinerja Perangkat Pemerintah Desa Sungai Tohor Barat dan Desa Sendanu Darul Ihsan. JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan). Proses rekrutmen dengan nepotisme mengakibatkan ketidakadilan dalam mendapatkan peluang menjadi salah satu perangkat desa. Dengan demikian, perlu proses rekrutmen yang terbuka dari stakeholder agar mendapatkan hasil yang baik.
  1. Bagi pihak Desa. Pemerintah desa merupakan suatu lembaga yang mengatur pemerintahan unit terkecil.
  2. Bagi masyarakat. Untuk masyarakat agar lebih partisipatif dalam kemajuan desa, baik hal terkecil maupun hal terbesar. Masyarakat merupakan salah satu pihak yang melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa.
  3. Bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama agar dapat meneliti pengaruh variabel lain terhadap kinerja perangkat desa, seperti tingkat pendidikan perangkat desa, pengalaman, kondisi lingkungan kerja, kepemimpinan kepala desa, dan lain sebagainya.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Rekrutmen**

#### a. Pengertian Rekrutmen

Secara umum rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Kunci utama menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi, *training*, dan *development* calon karyawan. Rekrutmen adalah serangkaian proses dalam

penerimaan anggota baru dalam suatu organisasi atau perusahaan, kalimat rekrutmen sering digunakan oleh perusahaan dalam penerimaan karyawan baru. Menurut Marwansyah (2014:106), rekrutmen adalah serangkaian aktivitas yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk menarik para pelamar kerja yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Menurut Rivai (2010:158) rekrutmen adalah pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Dari pendapat diatas rekrutmen, yaitu serangkaian aktivitas yang pada hakikatnya dilakukan oleh organisasi dalam menentukan dan menarik para pelamar kerja yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Menurut Mardianto (2014:8) diartikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan calon karyawan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi/perusahaan. Menurut Sofyandi (2010:108) rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dari pendapat diatas rekrutmen, yaitu serangkaian kegiatan atau proses yang dimulai ketika sebuah organisasi atau perusahaan memerlukan karyawan atau tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi atau kebutuhan sesuai dengan jabatan dalam sebuah

organisasi atau perusahaan.

b. Tahap-Tahap Dalam Rekrutmen

Menurut Endang, dkk (2017;46) Proses rekrutmen ialah dapat diartikan sebagai proses penarikan sejumlah karyawan yang berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai atau karyawan di perusahaan. Proses rekrutmen Seperti di bawah ini:

- 1) Menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan yang dibutuhkan perusahaan.
- 2) Merencanakan proses perekrutan karyawan.
- 3) Memasang iklan lowongan kerja di media social.
- 4) Memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara terhadap pelamar.
- 5) Memilih kandidat yang sesuai dengan perusahaan dan membuat penawaran kerja secara tertulis.
- 6) Menerima karyawan baru yang sudah dinyatakan lulus dan sesuai kriteria sesuai harapan perusahaan.

c. Sumber-Sumber Rekrutmen

Rachmawati (2008:91), unsur lain dalam strategi rekrutmen suatu organisasi adalah keputusan dimana mencari calon pelamar. Manajemen memulai proses perekrutan dengan mengingat uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Perekrutan tenaga kerja dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu internal dan eksternal.

1) Internal

Cara ini memiliki keuntungan, tenaga kerja yang direkrut sudah

memahami organisasi dengan baik sehingga proses penyesuaian menjadi lebih mudah dan kemungkinan berhasil akan semakin tinggi. Kerugian, kemungkinan terbatasnya calon tenaga kerja yang potensial dalam organisasi, kurangnya ide baru yang segar yang biasanya datang dari pendatang baru dan kemungkinan pendorong rasa puas diri pada tenaga kerja yang ada yang tidak mendorong prestasi kerja lebih lanjut. Rekrutmen ini dapat dilakukan melalui sistem informasi tenaga kerja yang ada dalam organisasi atau melalui bagan pergantian untuk tingkat manajemen yang lebih tinggi.

#### 2) *Job Postings*

Salah satu teknik rekrutmen dari dalam di mana organisasi mengumumkan posisi jabatan yang kosong dalam organisasi sehingga memberikan peluang pada semua pegawai untuk bersaing secara sehat dengan mengajukan lamaran secara formal.

#### 3) Referensi Manajemen

Dalam cara ini, perekrutan dilakukan melalui referensi dari karyawan lain dalam organisasi karena telah mengetahui potensi dan keahlian karyawan yang direkomendasikan pada manajemen untuk pekerjaan yang dimaksud.

#### 4) Eksternal

Perekrutan tenaga kerja eksternal berusaha menarik calon tenaga kerja dari luar organisasi. Dapat dilakukan melalui iklan posisi pekerjaan melalui surat kabar atau majalah atau melalui universitas

yang akan menghasilkan lulusan yang dikehendaki rekrutmen dengan cara lain adalah dengan dengan bekerja sama dengan lembaga swasta, baik formal maupun informal, departemen tenaga kerja, atau kelompok swadaya masyarakat untuk merekrut calon yang potensial. Dalam bukunya Wahjono (2015:44) menjelaskan bahwa sumber-sumber rekrutmen eksternal dibagi menjadi enam cara guna mendatangkan tenaga kerja yang kompeten, yaitu:

a) Iklan

Pada umumnya, pemasangan iklan bisa dilakukan pada media yang dibaca oleh kelompok tertentu, bisa juga pada media yang dibaca oleh kalangan luas dengan mencantumkan spesifikasi jabatan.

b) Serikat/Perkumpulan Karyawan

Serikat atau perkumpulan yang dibentuk oleh para pekerja di suatu perusahaan yang berfungsi sebagai wadah yang memperjuangkan hak-hak karyawan. Serikat yang baik mempunyai daftar anggota yang jelas.

c) Sewa Guna Usaha

Teknik ini biasa dipakai pada organisasi yang ingin melakukan penghematan dari segi anggaran sumber daya manusia, seperti menghemat dana pensiun, asuransi, insentif, atau tunjangan lainnya.

d) *Walk In*

Metode perekrutan dimana pelamar mendatangi langsung

tempat yang telah disediakan oleh perusahaan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Biasanya tes dan pengumuman hasil akan diumumkan langsung setelah dilakukan.

d. Tujuan Rekrutmen

Tujuan Rekrutmen (E. Eryana, 2020:15):

- 1) Menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja/karyawan yang memenuhi syarat.
- 2) Agar konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan.
- 3) Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja.
- 4) Untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan.
- 5) Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja.

e. Seleksi

Seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber daya manusia yaitu pengadaan (*procurement*), sedangkan pengadaan itu sendiri terdiri dari: perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan dan produksi. Proses seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan seleksi, yaitu materi dari operasional manajemen sumber daya manusia yaitu pengadaan yang terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan dan produksi. Menurut Simamora (2005:25), seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Sedangkan menurut Teguh (2009:17) menjelaskan bahwa seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah yang spesifik dari kelompok pelamar yang paling cocok dan memenuhi syarat untuk jabatan tertentu. Dari pendapat para ahli seleksi, yaitu proses pemilihan yang terdiri dari berbagai langkah yang spesifik yang memenuhi kriteria seleksi dari kelompok atau organisasi yang tersedia di perusahaan.

f. Kriteria dan Teknik Seleksi

Kriteria seleksi menurut Simamora (2004: 202) pada umumnya dapat dirangkum dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Pengalaman kerja.
- 2) Kondisi fisik.
- 3) Kepribadian.
- 4) Teknik Seleksi.
- 5) *Interview*.
- 6) Tes psikologi.
- 7) Tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan.
- 8) Pusat pelatihan.
- 9) Biodata.



10) Referensi.

11) Grafologi (ilmu yang berkenaan dengan tulisan tangan).

## **2. Kinerja**

Menurut Prabu Anwar (2005:67) Kinerja (Prestasi Kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Hasibuan (2003:34) Seminar Nasional Dan Call For Papers Uniba 2014:85 Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Dari pendapat para ahli di atas kinerja, yaitu prestasi kerja dari hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

### **a. Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan menurut Simamora (2005:25) adalah proses sistematis pengubahan perilaku para karyawannya dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan dimana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan.

### **b. Motivasi Kerja**

Motif atau dalam bahasa asing disebut motive adalah sesuatu seperti

kebutuhan atau keinginan yang mendorong atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan gerak (Pamudji, 2000:127). Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, yang berlangsung secara sadar.

c. Intensif

Insentif merupakan perangsang atau daya tarik yang sengaja diberikan oleh perusahaan baik manajer maupun karyawan dengan tujuan ikut membangun, memelihara dan memperkuat harapan-harapan manajer dan karyawan agar dalam diri mereka timbul semangat kerja yang lebih besar untuk berpartisipasi bagi perusahaan dalam hal peningkatan produktivitas kerja.

### **3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)**

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) seperti tertuang pada Undang- Undang Desa No 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa Pasal 87, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMDesa merupakan usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Pembentukan BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan BUMDesa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan BUMDesa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. BUMDesa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana.

Definisi BUMDesa menurut Maryunani (2008:35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDesa adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Menurut Sutoro Eko Yunanto, dalam bukunya yang berjudul “Membuat BUMDesa Kokoh, Mandiri dan Berkelanjutan” Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) digadang-gadang sebagai jalan untuk mengembangkan ekonomi Desa. Meski benar, tapi itu bukanlah satu-satunya tujuan. Menurutnya, BUMDesa bukan sekadar bisnis

konvensional yang hanya menimbang untung-rugi. Tetapi, BUMDesa mesti hadir dengan semangat korporasi kerakyatan serta hasil konsolidasi Desa untuk menjawab marginalisasi dan isolasi ekonomi. (<https://kongreskebudayaandesa.id/sutoroekoyunantodedikasinyamemulikan-desa/.html>).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDesa hadir sebagai solusi untuk memandirikan rakyat khususnya yang berada di pedesaan. menurut Sutoro Eko juga BUMDesa bukan satunya satunya dalam memandirikan ekonomi desa namun BUMDesa harus hadir sebagai korporasi kerakyatan serta hasil konsolidasi desa guna menjawab marjinalisasi di tengah masyarakat desa.

#### b. Indikator dan Peran BUMDesa

Pendirian BUMDesa sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki peran, ciri sebagai berikut:

##### 1) Peran BUMDesa

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan BUMDesa pemerintah desa.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan BUMDesa pemerintah desa.
- c) Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa.
- d) Membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan

sumber sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber sumber ekonomi.

- e) Menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang

## 2) Ciri Utama BUMDesa

- a) Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama.
- b) Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
- d) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar.
- e) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyetoran modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f) Difasilitasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa.
- g) Operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh BPD, pemerintah desa dan anggota.

## 3) Tujuan Pendirian BUMDesa

- a) Meningkatkan perekonomian desa.
- b) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- c) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

#### **4. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)**

##### a. Pengertian Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)

Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Oleh karena itu, didirikanlah Badan Usaha Milik Kalurahan yang disebut BUMKal. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa, Desa atau Kalurahan diposisikan sebagai “Kekuatan Besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat dalam NAWACITA atau prioritas pembangunan lima tahun ke depan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan lain dari Badan Usaha Milik Desa yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan untuk mengelola usaha dan memanfaatkan aset dan produktivitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan. BUMKAL dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. BUMKAL dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuangan dan bentuk keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kalurahan. (D. Ismanto, 2022:268-276).

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan BUMKal, yaitu badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan dan dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan.

b. Secara Umum Pendirian BUMKal

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Memberdayakan Kalurahan sebagai wilayah yang otonom berkaitan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya peningkatan kesejahteraan.
- 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas kalurahan serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

c. Prinsip-Prinsip Tata Kelola BUMKal

Kooperatif, Partisipatif, Emansipasi, Transparan, Akuntabel,

Sustainable, Tata Kelola BUMKAL. Prinsip dasar ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam kinerja dan produktivitas BUMKAL. BUMKAL harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga pengelolaan BUMKAL akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **5. Pemerintah Desa**

### **a. Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan Pemerintah Desa, yaitu lembaga Pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa dan sudah diatur melalui peraturan Pemerintah.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

b. Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2014:22) Pemerintah mempunyai tugas pokok:

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga Desa, urusan Pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- 2) Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini

sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina perekonomian desa.
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 10) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

c. Wewenang Pemerintah Desa

Kepala desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- 3) Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 6) Membina perekonomian Desa.
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.

d. Tugas Pemerintah Desa

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan

Desa.

- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan.
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.

e. Perangkat dan Tugas Kalurahan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan BAB V Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pasal 26, yaitu:

- 1) Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.
- 2) Jagabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf a mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang.
- 3) Ulu-ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf b mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.
- 4) Kamituwo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.
- 5) Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)

mempunyai tugas:

- a) membantu Lurah dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- b) pemantauan penggunaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten
- c) pemantauan pemanfaatan tata ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten
- d) ikut pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di wilayah masing-masing

f. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan Desa dan pembangunan Desa secara keseluruhan. (L. Yasin, 2018:1-19).

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan BPD, yaitu organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

1) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
  - b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  - c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- 2) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 56 menjelaskan bahwa:

- a) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- b) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- c) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Yang menggambarkan suatu hasil penelitian. Menurut Mukhtar (2013:10) sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap subjek penelitian pada suatu

saat tertentu. Metode penelitian deskriptif ini digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan menggambarkan data secara alamiah.

## 2. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005:75-76) menjelaskan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dengan penjelasan diatas, maka penulis meletakkan unit analisis pada obyek dan subyek penelitian. Obyek dan subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Obyek: Hubungan Rekrutmen Pengurus Dengan Eksistensi BUMKal di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Sleman.
- b. Subyek: Subyek unit analisis dalam penelitian ini, yaitu purposive teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Berikut data informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I. 1 Data Informan Kalurahan Wonokerto**

No	Nama Lengkap	JK	Pendidikan	Pekerjaan
1	Riyanto Sulistyو Budi,S,E	L	S1	Lurah
2	Samijo, S.Sos	L	S1	Carik Wonokerto
3	Sunaryadi	L	SMA	Ketua BUMKal
4	Fera Arista	P	S1	Toto Laksono
5	Taufiq Arumananto, S.Kom	L	S1	Ulu-Ulu
6	Drs. Eko Wahyudi	L	S1	Kaur Pangripto
7	Ridwan	L	SMA	Dukuh Sempu
8	Es Haryanto	L	STM	Petani

*Sumber Data: Data lapangan peneliti 2023*

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Menurut Bungin (2007:115-117), observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam pengumpulan data. Hasil observasi berupa hasil aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dari pengertian diatas langkah dalam observasi terjun langsung ke lokasi penelitian dan mengamati aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat yang berkaitan dengan fokus penelitian atau apa yang kita teliti.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi dan data. Proses wawancara terkadang masih banyak yang tidak memahami karena wawancara dianggap sebagai bentuk dari percakapan yang sedang dilakukan dalam keseharian. Menurut Yunus (2010:385) menyebutkan bahwa wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Bertanya langsung kepada informan atau narasumber yang berperan langsung dalam hubungan Rekrutmen pengurus dengan Eksistensi BUMKal yang berkaitan dengan apa yang kita teliti dan hasil wawancara itu bisa menjadi sebuah data yang kuat dan aktual.



### c. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data menganalisis dokumen yang berbentuk gambar, tulisan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Dokumentasi berupa gambar, tempat pelaksanaan BUMKal, kegiatan yang berkaitan dengan BUMKal, file tentang kegiatan BUMKal.

## 4. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Miles dan Huberman (1992:90) menggambarkan analisis data kualitatif sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang diperoleh di lapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan seefisien mungkin atau membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diversifikasi.

b. Penyajian Data

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah dipilih dan dikelompokkan secara sistematis dalam bentuk uraian sebagai sebuah laporan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengkonstruksikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data yang telah dipilih tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dan disusun dalam bentuk uraian tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan. Kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN WONOKERTO**

#### **A. Sejarah Kalurahan Wonokerto**

Wonokerto adalah salah satu kalurahan di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya Kalurahan Wonokerto merupakan wilayah yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yakni: Kalurahan Tunggul, Kalurahan Ledok Lempong, Kalurahan Garongan, dan Kalurahan Garongan. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka Kalurahan-Kalurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu kalurahan otonom dengan nama Kalurahan Wonokerto kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan.

Pada masa berjalannya pemerintahan dipimpin oleh beberapa orang sampai dengan saat ini, kiprah yang diberikan sangatlah bagus karena membawa dari zaman ke zamannya dengan gaya dan tata cara memimpin yang berbeda. Sejak tahun 1948 ini Pemerintah Kalurahan Wonokerto dipimpin diantaranya sebagai berikut:

1. M. Ng Radiyo Hadi Sugondo pada tahun 1984-1986;
2. Sastrodihardjo pada tahun 1964-1996;
3. H Suhartono pada tahun 1996-2004;
4. Kasidi, BA pada tahun 2004-2015;
5. Tomon Haryo Wirosobo, S.Sos pada tahun 2015-2021;

6. Riyanto Sulistyو Budi, SE pada tahun 2021-sekarang.

Dari masa ke masa pemerintah kalurahan berubah menjadi lebih baik dan tertata dengan mengimbangi perkembangan zaman yang serba modern dengan pengembangan teknologi dan pemerintahannya pun mengalami perubahan dengan kebijakan dan regulasi yang mengikat dan tertib.

## **B. Kondisi Geografis**

### **1. Batas Administrasi**

Secara administratif Kalurahan Wonokerto merupakan salah satu Kalurahan yang berada di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kalurahan Wonokerto memiliki batas-batas dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kalurahan Girikerto, Kecamatan Turi, Taman Nasional Gunung Merapi.
Sebelah Timur	:	Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi.
Sebelah Selatan	:	Kalurahan Donokerto, Kaluraha Bangukerto, Kapanewon Turi.
Sebelah Barat	:	Desa Kaliurang, Desa Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Kalurahan Wonokerto terdiri dari 13 Padukuhan yang terdiri dari 64 RT dan 29 RW dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.1. Pembagian Wilayah Padukuhan, RW dan RT Kalurahan Wonokerto

No	Nama Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Tunggul Arum	2	4
2	Gondoarum	2	4
3	Sempu	2	7
4	Banjarsari	3	5
5	Manggung Sari	2	4
6	Imorejo	2	4
7	Jambusari	3	4
8	Dukuhsari	2	4
9	Kembang	2	4
10	Pojok	2	4
11	Becici	2	5
12	Dadapan	3	6
13	Sangurejo	2	5
<b>Total</b>		<b>29</b>	<b>64</b>

*Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027*

Pada hakikatnya Kalurahan Wonokerto menggambarkan potret Kalurahan secara *eksisting* beserta persoalannya untuk dikaji lebih mendalam untuk pengembangan Kalurahan kedepan dalam jangka enam tahun yang berfokus pada tiga sektor yaitu Agrobisnis, Agroindustri dan Agrowisata.

## 2. Kondisi Fisik Wilayah

Luas wilayah Kalurahan Wonokerto 1.547 Ha, yang terdiri dari wilayah untuk sawah/industry, ladang/tegalan. perkebunan, permukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan rakyat dan lain-lain. Adapun perinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2. Penggunaan Lahan Kalurahan Wonokerto

No	Nama Padukuhan	Jenis Penggunaan Lahan							Jumlah	
		Sawah/ Pertanian	Ladang/ Tegalan	Industri	Perkebunan	Perikanan	Perdagangan dan Jasa	Hutan		Lain - lain
1	Tunggularum	5	80	-	40	44	-	17	4	190
2	Gondoarum	10	38	-	50	10	-	-	-	108
3	Sempu	-	1,2	-	34	51,3	-	-	-	86,3
4	Banjarsari	74	13,5	-	1,9	4,9	-	-	-	94,3
5	Manggungsari	4	20,5	-	53,5	8	-	-	-	86
6	Imorejo	25,3	5,4	1	1	31,5	-	-	-	64,2
7	Jambusari	37	10	-	-	2	-	-	1	50
8	Dukuhsari	36	-	-	10	9	-	-	-	55
9	Kembang	8	-	-	45	7,5	1	-	-	61,55
10	Pojok	5	2,7	-	14,6	21	-	-	-	43,3
11	Sangurejo	28	4	-	-	8	-	-	-	40
12	Becici	3,4	2,8	0,2	31,8	25,8	2,9	-	-	66,9
13	Dadapan	0,7	9	-	32,5	15	-	-	-	57,2
<b>Total</b>		<b>236,4</b>	<b>187,1</b>	<b>1,2</b>	<b>314,3</b>	<b>238</b>	<b>3,9</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>1002,9</b>
Presentase (%)		23,5%	18,66%	0,12%	31,3%	23,73%	0,39%	1,70%	0,50%	100,0%

Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027

Dari luasan wilayah tersebut masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, keadaan ini membawa pengaruh yang kuat dalam hal sumber daya pangan dan mata pencaharian penduduk Kalurahan Wonokerto. Karakteristik tersebut didominasi oleh luas perkebunan dengan presentasi 314,3% diikuti area pertanian sebesar 23,57% dan wilayah pemukiman sebesar 23,73%.

### 3. Kondisi Topografi

Kalurahan Wonokerto berada di kaki /lereng gunung merapi yang terletak di Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa

Yogyakarta. Secara geografis, Kalurahan Wonokerto terletak pada ketinggian 400 s/d 900 m dari permukaan air laut. Dengan ketinggian tersebut, sebagian besar wilayahnya adalah pertanian. Kalurahan Wonokerto adalah daerah pertanian dengan sumber mata air 26 mata air yang mengalir ke beberapa sungai krasak, sungai bedog dan sungai sempor, yang mencukupi kebutuhan irigasi pertanian. Curah hujan rata-rata 3,908 mm pertahun dengan suhu udara 24<sup>0</sup>C s/d 28<sup>0</sup>C. Sumber air tanah yang mengalir dibawah permukaan berada di jalur mata air Turi - Sleman yang pemanfaatannya digunakan untuk sumber air bersih dan irigasi. Namun pada musim kemarau sebagian wilayah kekurangan air untuk pertanian, sedangkan untuk kebutuhan air minum sumber air tanah/ sumur di Kalurahan Wonokerto masih tercukupi. Kondisi tanah di wilayah Kalurahan Wonokerto merupakan daerah perbukitan/pegunungan yang subur dengan struktur tanah yang merupakan tanah berpasir dan berbatu cadas.

#### **4. Kondisi Demografi**

Data kependudukan yang disajikan bersumber dari potensi Kalurahan dan hasil survey oleh masyarakat. Data-data kependudukan tersebut meliputi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk 5 tahun terakhir, struktur umur, struktur pendidikan, dan struktur mata pencaharian. Jumlah penduduk Kalurahan Wonokerto pada tahun 2020 adalah 10.125 jiwa dengan rincian 5.075 jiwa laki-laki dan 5.050 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kalurahan Wonokerto

adalah 3085 KK.

## 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel II.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Padukuhan	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Tunggularum	308	395	703	190
2	Gondoarum	288	295	583	194
3	Sempu	557	535	1092	362
4	Banjarsari	394	387	781	236
5	Imorejo	337	359	649	185
6	Manggung Sari	335	314	649	185
7	Jambusari	354	358	722	219
8	Dukuhsari	362	312	674	200
9	Kembang	313	359	672	192
10	Pojok	340	285	625	187
11	Becici	502	457	959	298
12	Dadapan	487	486	973	296
13	Sangurejo	498	498	996	297
<b>Total</b>		<b>5075</b>	<b>5050</b>	<b>10125</b>	<b>3085</b>

Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada setiap Padukuhan bervariasi baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah penduduk paling banyak berada pada Padukuhan Sempu yakni jumlah 1092 jiwa dengan jumlah laki-laki 557 dan perempuan berjumlah 535 orang.



## 6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tabel II.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 tahun	211	229	440
2	6 – 12 tahun	655	634	1289
3	18-30 tahun	810	890	1700
4	31-60 tahun	2412	2406	4818
5	>60 tahun	5075	5050	1878
<b>Jumlah</b>		<b>5075</b>	<b>5050</b>	<b>10125</b>

*Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027*

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan di Kalurahan Wonokerto didominasi usia produktif dengan jumlah 4818 orang berumur 30 sampai dengan 60 tahun.

## 7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel II.5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Pertanian	925	855	1.780
2	Pertambangan	57	15	72
3	Listrik, dan gas	33	12	45
4	Sektor bangunan	576	178	764
5	Perdagangan, hotel dan restoran	357	221	578
6	Industri pengolahan	55	21	76
7	Pengangkutan dan komunikasi	105	113	218
8	Jasa keuangan dan persewaan	186	123	309
<b>Total</b>		<b>4.043</b>	<b>3.475</b>	<b>7.518</b>

*Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027*

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk dengan mata pencaharian pertanian lebih banyak dengan jumlah 1.780 orang, berikutnya penduduk dengan mata pencaharian sektor bangunan berjumlah 764 orang. Sedangkan penduduk dengan mata pencaharian sebagai listrik dan gas paling rendah dengan jumlah 72 orang.

## 8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel II.6. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah Dasar	229	287	511
2	Tamat SD	915	820	1735
3	Tamat SLTP	965	977	1947
4	Tamat SLTA	2219	2045	4264
5	Sarjana	267	4733	9685
<b>Jumlah</b>		<b>4952</b>	<b>3475</b>	<b>7518</b>

Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027

Jika dilihat dari tabel II.17 diatas bahwa jumlah penduduk berdasarkan struktur pendidikan di Kalurahan Wonokerto dengan ijazah terakhir Sarjana menempati porsi terbesar yaitu 9.684 orang, sedangkan yang paling terkecil adalah tidak tamat Sekolah Dasar sebanyak 511 orang. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan di Kalurahan Wonokerto cukup baik.

## 9. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel II.7. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Islam	4657	4566	9223
2	Kristen	59	50	109
3	Katholik	357	432	780
4	Hindu	2	2	4
5	Budha	0	0	0
6	khonghucu	0	0	0
<b>Total</b>		<b>5.075</b>	<b>5.050</b>	<b>10.125</b>

Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah penduduk menurut agama yaitu agama Islam dengan jumlah penganut sebanyak 9.223 orang, Katolik sebanyak 780 orang dan Kristen sebanyak 109 orang serta

penganut agama Hindu adalah 4 orang. Dengan begitu dapat dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Wonokerto adalah pemeluk agama Islam namun tingkat kerukunan dan toleransi umat beragama sangat tinggi. Hal tersebut mampu mendorong nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat.

## **C. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi**

### **1. Kondisi Sosial**

Kondisi sosial masyarakat Kalurahan Wonokerto yang penuh kebersamaan, kegotongroyongan hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Nilai-nilai kekeluargaan masih dijunjung tinggi, sehingga setiap ada persoalan yang muncul selalu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan melalui musyawarah melalui mufakat. Disamping itu, hubungan kekerabatan dan keterikatan yang kuat mendorong masyarakat untuk saling bantu- membantu baik dalam hal kesusahan maupun ketika masyarakat punya hajatan seperti kenduri/kondangan yang sering dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar islam maupun peringatan-peringatan lainnya.

### **2. Kondisi Budaya**

Budaya yang berkembang di Kalurahan Wonokerto adalah budaya masyarakat agraris, salah satunya adalah sifat gotong royong dan kekeluargaan masyarakatnya masih tinggi. Keberadaan kesenian di Kalurahan Wonokerto sangat beragam yang bernuansa adat jawa seperti kesenian jatilan, Kubro Siswo, Dayakan, Baduy, Wayang Orang sampai

yang bernuansa Islami seperti Hadroh. Semua berkembang dengan baik dan selaras dikarenakan masyarakat Kalurahan Wonokerto selain agamis juga mempunyai budaya kearifan lokal yang tinggi terhadap anggota masyarakat sekitar. Warga Kalurahan Wonokerto juga masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka sebagai orang Jawa seperti masih menjalankan/melaksanakan berbagai upacara-upacara tradisi yang berkaitan dengan daur hidup atau *life circle*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Upacara Mitoni adalah upacara selamatan pada saat usia kehamilan mencapai genap tujuh bulan.
- b. Upacara Puputan yaitu upacara selamatan pada saat tali pusat bayi sudah lepas/mengering.
- c. Jagoan yaitu acara wungon (tidak tidur semalam suntuk) atau bertandang di rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada malam hari selama kurang lebih tujuh malam (satu minggu).
- d. Selapanan yaitu acara kenduri atau selamatan bertepatan dengan usia bayi 35 hari sebagai ucapan rasa syukur.
- e. Upacara kematian, dari surtanah, upacara kenduri tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari.
- f. Upacara Khitanan yaitu tanda bahwa anak lelaki sudah mulai memasuki aqil baliq menjadi laki-laki dewasa.
- g. Upacara pernikahan dengan berbagai pernik tradisi jawa seperti siraman, midodareni, ijab, panggih dan resepsi.
- h. Upacara Adat Merti Bumi sebagai *icon* Kalurahan Wonokerto yang

diwujudkan atas rasa syukur kepada Tuhan.

- i. Upacara Adat Pengger Bumi yang secara garis besar hampir sama dengan upacara Merti Bumi.

### **3. Kondisi Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kalurahan Wonokerto terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor utama adalah pertanian termasuk di dalamnya perkebunan salak, perikanan dan peternakan. Hal ini bisa dilihat dari mata pencaharian penduduk, yang rata-rata adalah petani untuk sektor pertanian didominasi oleh pertanian/perkebunan salak pondoh yang merupakan pendapatan utama para petani dan merupakan sektor yang telah mengangkat perekonomian masyarakat Kalurahan Wonokerto. Akan tetapi lima tahun terakhir ini harga salak pondoh jatuh, harga di pasaran tidak bisa menutup biaya operasional dan biaya produksi. Saat ini banyak tanaman salak pondoh yang di diganti dengan tanaman lain yang lebih menguntungkan.

Sektor jasa dan perdagangan meliputi Padukuhan Tunggularum, Gondo Arum, Sempu, Banjarsari, Pojok dan Sangurejo yang dilalui jalan kabupaten dan provinsi banyak berdiri swalayan, warung makan, toko kelontong, pasar desa, toko bahan bangunan, perbengkelan dan lain-lain.

Sektor perikanan di padukuhan kembang, pojok sebagian Sangurejo karena wilayah itu mempunyai ketersediaan sumber daya air baik di musim hujan maupun musim kemarau.

Di Padukuhan Tunggularum, Gondoarum dan Manggungsari

masih mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan lahan kering karena kondisi geografis merupakan tanah tegalan yang pada musim kemarau sangat kekurangan air untuk pertanian. Mengingat Desa Wonokerto merupakan kawasan rawan bencana. Fasilitas ekonomi dan perdagangan yang berada di Kalurahan Wonokerto sudah cukup lengkap dan memadai terutama untuk tingkat pelayanan dengan skala lokal. Pasar yang ada di Kalurahan Wonokerto tidak hanya melayani wilayah Kalurahan Wonokerto saja, akan tetapi juga melayani Kalurahan di sekitarnya.

Di Wonokerto juga memiliki obyek wisata baik yang dikelola oleh Kalurahan maupun oleh masyarakat yaitu Wisata Bumi Perkemahan di Padukuhan Pojok, Wisata Alam di Padukuhan Tunggularum. Sedangkan peternakan yang dikembangkan di Kalurahan Wonokerto adalah ternak sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, bebek/itik, burung puyuh dan ayam. Harapan dikembangkannya potensi/usaha peternakan tersebut oleh masyarakat tidak lain juga untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Berikut adalah tabel potensi ekonomi di Kalurahan Wonokerto.

Tabel II.8. Potensi Ekonomi di Kalurahan Wonokerto

No	Potensi Ekonomi	Lokasi	Jumlah Pelaku Usaha (orang)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Jumlah/Kapasitas Produksi	Pemasaran	Keterangan
1	Warung/ Tempe	Tunggularum	9/3	9/3			
2	Bengkel Warung Bakul Salak Ternak Puyuh Termak Sapi Ternak Kerbau	Gondoarum	2 5 4 1 72 1	2 6 4	1500 3		
3	Salak Pondoh Bakul Salak Pedagang Mebel Tempe	Sempu	390 2 1 2 1	455 5 2 7 4	2668	pasar	
4	Pembuat Tempe	Manggungsari	3	3	30kg	pasar	
5	Pedagang Salak Pedagang Gula Kelapa, Batako Mebel Kelontong Perikanan	Imorejo	29 21 1 1 2 4 1	50 2 2 3 4 1	12ton/hari		
6	Perkebunan Bengkel Warung Pkl	Jambusari	183 1 4 3	262 1 4 3			
7	Wajik Salak Bengkel Motor Meubel Warung Kerajinan Keranjang Tempe Las Servis Elektronik	Dukuhsari	1 - 1 2 - 11 28 1 1	2 - 1 2 - 11 30 4	40 bks/hari 3 mtr/hari 2 set/hari - 10 bh/hari 100 bh/hari Menyesuaikan	Pesanan Lokal Lokal Lokal Lokal Pasar Lokal	

	Roti Loundry Ternak Ayam Gergajian Dagang Salak		2- 2 - 1 - 1 - 1 7	2 2 1 3 2 6 4 16	Menyesuain Pesanan Menyesuain 1500 ek/panen Pesanan 2 kw/hari	Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal	
8	Bengkel Motor Penjahit Pemotongan Ayam Pternakan Ayam Ternak Kelinci Ternak Kalakun Perikanan Eksporsalak Pengepul Salak	Kembang	2 4 1 2 1 1 30 45 2	4 10 3 5 2 1 30 6 2	2 ton/tahun	Pasar Asia Pasar	
9	Tukangkayu Tempe Makanan Ringan Dawet Angkringan	Sangurejo	1 3 5 3 3	4 6 5 5 6		Lokal Pasar umum	
10	Perkebunan Perikanan Home Industri Perdagangan Salak Warungan Perternakan	Becici	200 40 2 17 15 50	30 10 1 5 5 10	150 ton 2 ton 6 ton 152 ton 10 jt/tahun 300 ekor	Lokal Lokal lokal	
11	Produksi Tahu Perikanan Budidaya Jamur Salon Bengkel Ternak Kelinci Ternak Kambing	Dadapan	35 35 32 1 2 1 6	35 35 32 1 2 1 6	10 kg/hr 1kwintal/3 bln 5kg/hr		

Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027



Tabel diatas menunjukkan potensi-potensi yang ada di Kalurahan Wonokerto ini dapat membantu untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kalurahan Wonokerto.

#### **D. Kondisi Sarana dan Prasarana**

##### **1. Pendidikan**

Fasilitas Pendidikan di Kalurahan Wonokerto cukup memadai mulai dari PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dari 13 padukuhan, 7 padukuhan memiliki fasilitas PAUD, pendidikan TK terdapat di 6 Padukuhan. Sementara untuk SD juga tersebar di 7 Padukuhan. Pendidikan SMP dan SMU/SMK hanya ada 1 yang terletak di Padukuhan Sangurejo karena padukuhan tersebut terletak di wilayah yang dekat pusat pemerintahan Kecamatan Turi. Adapun untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi belum ada. Untuk mendapatkan pelayanan pendidikan tersebut, pelajar harus keluar dari wilayah Wonokerto yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dituju. Berikut sebaran fasilitas pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.9. Jumlah dan sebaran fasilitas Pendidikan

No	Nama Padukuhan	PAUD	TK	SD	SMP	SMU/SMK
1	Tunggularum	1	-	-	-	-
2	Gondoarum	-	-	-	-	-
3	Sempu	1	1	1	-	-
4	Banjarsari		-	-	-	-
5	Manggungsari	-	1	1	-	-
6	Imorejo		1	1	-	-
7	Jambusari	1	-	1	-	-
8	Dukuhsari	1	-	-	-	-
9	Kembang	-	1	1	-	-
10	Pojok	-	-	-	-	-
11	Sangurejo	1	2	1	1	1
12	Becici	1	1	-	-	-
13	Dadapan		-	1	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027

Fasilitas Pendidikan di Kalurahan Wonokerto cukup memadai mulai dari PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dari 13 padukuhan, 7 padukuhan memiliki fasilitas PAUD, pendidikan TK terdapat di 6 padukuhan. Sementara untuk SD juga tersebar di 7 padukuhan. Pendidikan SMP dan SMU/SMK hanya ada 1 yang terletak di Padukuhan Sangurejo karena padukuhan tersebut terletak di wilayah yang dekat pusat pemerintahan Kecamatan Turi. Adapun untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi belum ada dan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan tersebut, pelajar harus keluar dari wilayah Wonokerto yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dituju.

## 2. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kalurahan Wonokerto cukup lengkap. Terdapat 3 buah puskesmas pembantu di Padukuhan Gondoarum, Padukuhan Sempu dan Padukuhan Banjarsari. Selain itu, juga terdapat POSKESDES yang terletak di Padukuhan Imorejo dan Polindes di Padukuhan Banjarsari. Sedangkan posyandu terdapat pada 13 pedukuhan yang ada di Kalurahan Wonokerto. Berikut merupakan tabel tentang jumlah fasilitas kesehatan dibawah ini:

Tabel II.10. Jumlah dan Sebaran Fasilitas Kesehatan

No	Nama Padukuhan	PUSKEMAS PEMBANTU	POSYANDU	POSKESDES
1	Tunggularum	-	1	-
2	Gondoarum	1	1	-
3	Sempu	1	1	-
4	Banjarsari	1	3	1
5	Manggungsari	-	1	-
6	Imorejo	-	1	1
7	Jambusari	-	1	-
8	Dukuhsari	-	1	-
9	Kembang	-	1	1
10	Pojok	-	1	-
11	Sangurejo	-	3	-
12	Becici	-	4	-
13	Dadapan	-	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>20</b>	<b>3</b>

*Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027*

Tabel diatas menunjukkan Fasilitas Kesehatan yang terdapat di Kalurahan Wonokerto terdiri dari 3 buah Puskesmas Pembantu yang terdapat pada Padukuhan Gondoarum, Padukuhan Sempu dan Padukuhan Banjarsari dengan jumlah sebaran berjumlah 1 buah Puskesmas Pembantu. Kemudian Kalurahan Wonokerto mempunyai 20 Posyandu yang tersebar di setiap Padukuhan serta terdapat 3 buah Poskesdes yang

tersebar pada Padukuhan Banjarsari, Padukuhan Imorejo dan Padukuhan Kembang.

### 3. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang ada di Kalurahan Wonokerto terdiri dari masjid dan mushola/langgar. Hampir semua padukuhan di Kalurahan Wonokerto sudah memiliki tempat peribadatan masjid ataupun langgar/mushola. Sedangkan fasilitas peribadatan agama lain selain Islam, tidak terdapat di Wonokerto karena bisa dikatakan bahwa hampir semua penduduk Kalurahan Wonokerto beragama Islam. Untuk penduduk non muslim pelayanan peribadatan dilakukan di wilayah lain. Adapun jumlah dan sebaran fasilitas peribadatan di Kalurahan Wonokerto dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.11. Jumlah dan Sebaran Fasilitas Peribadatan

No	Nama Padukuhan	Masjid	Mushola/ Langgar	Gereja	Klenteng/ Vihara
1	Tunggularum	1	-	-	-
2	Gondoarum	1	1	-	-
3	Sempu	4	1	-	-
4	Banjarsari	3	-	-	-
5	Manggungsari	1	-	-	-
6	Imorejo	4	-	-	-
7	Jambusari	2	2	-	-
8	Dukuhsari	2	1	-	-
9	Kembang	2	2	-	-
10	Pojok	3	3	-	-
11	Sangurejo	6	1	-	-
12	Becici	4	3	-	-
13	Dadapan	3	1	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027

Fasilitas peribadatan yang berada di Kalurahan Wonokerto terdiri dari Masjid dan Mushola/Langgar. Hampir semua Padukuhan di Kalurahan Wonokerto telah mempunyai tempat ibadah berupa Masjid

dan Mushola/Langgar dengan jumlah sebaran yang berbeda-beda. Sedangkan tempat peribadatan yang lain seperti tempat ibadah Gereja dan Klenteng/Vihara tidak ada karena dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Wonokerto adalah agama Islam.

#### 4. Fasilitas Perekonomian

Fasilitas perekonomian yang terdapat di Kalurahan Wonokerto terdiri dari pasar modern/ swalayan supermarket, pasar, ruko, toko dan warung/kios dan warung PKL. Selengkapnya jumlah dan sebaran fasilitas perekonomian dapat dilihat pada tabel II.13 berikut ini:

Tabel II.12. Jumlah dan Sebaran Fasilitas Perekonomian

No	Nama Padukuhan	Pasar Modern/ Swalayan/ Supermarket	Pasar Tradisional	Toko Bahan bangunan	Ruko	Toko	Warung /Kios	Warung PKL
1	Tunggularum	1	-		-	-	9	1
2	Gondoarum	1	-		-	1	3	-
3	Sempu	4	1	2	-	5	18	8
4	Banjarsari	1	-	1	-	3	8	2
5	Manggungsari	-	-		-	-	10	-
6	Imorejo	1	-		-	-	8	-
7	Jambusari	1	-		-		4	2
8	Dukuhsari	-	-	1	-	-	5	-
9	Kembang	-	1		-	-	8	-
10	Pojok	2	-		-	-	11	1
11	Sangurejo	4	-	3	-	14	12	4
12	Becici	-	-		-	-	6	-
13	Dadapan	-	-		-	-	7	-
Total		14	2	7	-	23	130	18

Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dengan adanya fasilitas-fasilitas ekonomi di Kalurahan Wonokerto sangat memadai dan memenuhi keperluan masyarakat, ini berarti pembangunannya sudah cukup baik. Selain itu fasilitas ekonomi dan perdagangan yang berada di Kalurahan Wonokerto sudah cukup lengkap dan memadai terutama untuk tingkat layanan dengan skala lokal. Pasar yang ada di Kalurahan Wonokerto tidak hanya melayani wilayah Kalurahan Wonokerto saja, akan tetapi juga melayani Kalurahan di sekitarnya.

#### 5. Fasilitas Pemerintah dan Pelayanan Umum

Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum yang terdapat di Kalurahan Wonokerto antara lain kantor balai Kalurahan, balai pertemuan, kantor dinas, gardu jaga, stasiun radio amatir, bengkel kerja, kantor parpol dan kantor lainnya. Yang paling banyak adalah gardu jaga dan tersebar di seluruh padukuhan di Kalurahan Wonokerto. Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.13. Jumlah Sebaran Fasilitas Pemerintah dan Pelayanan Umum

No	Nama Padukuhan	Balai Kantor Kalurahan	Balai Pertemuan	Kantor Dinas	Gardu Jaga	Radio/TV	Bengkel Kerja	Kantor KUA	Kantor Lain-lain
1	Tunggularum	-	1	-	4	-	-	-	-
2	Gondoarum	-	-	-	4	-	-	-	-
3	Sempu	-	-	-	6	2	-	-	2
4	Banjarsari	-	1	-	3	-	-	-	-
5	Manggungsari	-	-	-	2	-	-	-	-
6	Imorejo	1	1	-	4	-	-	-	-
7	Jambusari	-	-	-	4	-	4	-	-
8	Dukuhsari	-	-	-	5	-	5	-	-

9	Kembang	-	1	-	3	-	7	-	-
10	Pojok	-	-	-	4	-	1	-	-
11	Sangurejo	-	-	1	4	-	6	1	-
12	Becici	-	-	-	8	-	2	-	-
13	Dadapan	-	-	-	6	-	2	-	-
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027

#### E. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat tiga kelembagaan Desa yang mempunyai peranan dalam tata kelola Desa. Ketiga lembaga tersebut adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Wonokerto mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan.

Tabel II.14. Daftar Nama Pemeritahan Kalurahan Wonokerto

No	Nama	Jabatan
1	Riyanto Sulistyو Budi, S.E	Lurah
2	Samijo, S,Sos	Carik
3	Didik Irwanto, A.Md	Jogoboyo
4	Tauqid Armunanto, S.Kom	Ulu-Ulu
5	Baroji	Kamituwo
6	Fera Arista Wardani, S.Pd	Toto Laksono
7	Septefi Dwi Prasetyo, S.E	Dhanarto
8	Drs Eko Wahyudi	Pangripto
9	Kristanto	Dukuh Tunggularum
10	Mustijo	Dukuh Gondoarum
11	Ridwan	Dukuh Sempu
12	Supangat	Dukuh Banjarsari
13	Rahmad Badawi	Dukuh Imorejo
14	Tri Hartono	Dukuh Manggungsari
15	Rebatman	Dukuh Jambusari
16	Ganjar Asmara	Dukuh Dukuhsari
17	Rahman Hidayat	Dukuh Kembang
18	Yayan Bintarto	Dukuh Pojok
19	Dhono Setiawan	Dukuh Becici

20	Sarmin	Dukuh Dadapan
21	Sehadi	Dukuh Sangurejo
22	Yunita Sari Widayanti, A.Md	Staf Carik
23	Danny Roesdhiana. A.Md	Staf Jogoboyo
24	Agus Hardono, A,Md	Staf Kamituwo
25	Aditya Yosefin Damarjati, S.E	Staf Ulu – Ulu
26	Feri Fitanto, S.Pd	Staf Kepala Urusan Dhanarto
27	Sulastri, S.Si	Staf Kepala Urusan Toto Laksono
28	Marjuni	Staf Pangripto
29	Farida Ika Rahma, S.Kep	Staf Pangripto
30	Jumingin	Penjaga Kantor

*Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027*

Kepala Kalurahan tidak berdiri secara sendiri tetapi juga didukung oleh perangkat-perangkat di bawahnya yang menjadi instrumen dalam keberlangsungan terhadap pelayanan dan program kerja Kalurahan menuju kemajuan dan kemandirian. Di Sisi yang lain juga ada kontrol terhadap proses kerja pemerintah Kalurahan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dalam hal ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang dipilih secara demokratis kemudian menjadi wakil dari kelompok masyarakat yang menjadi mitra pemerintah Kalurahan dalam menjalankan proses roda organisasi pemerintah Kalurahan Wonokerto. Berikut daftar keanggotaan BPD Kalurahan Wonokerto yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.15. Daftar Anggota BPD Wonokerto

No	Nama	Jabatan
1	Sutarja	Ketua
2	Sunarja, A.Md	Wakil Ketua
3	Siti Yuningsih, A.Md	Sekretaris
4	Sugito, S.Pd	Ketua Pokja Pemerintahan
5	Dari Sri Anto Hadi, ST	Ketua Pokja Pembangunan
6	Sunyoto	Anggota
7	Sri Eka Mardiyana	Anggota
8	Sumarjana	Anggota

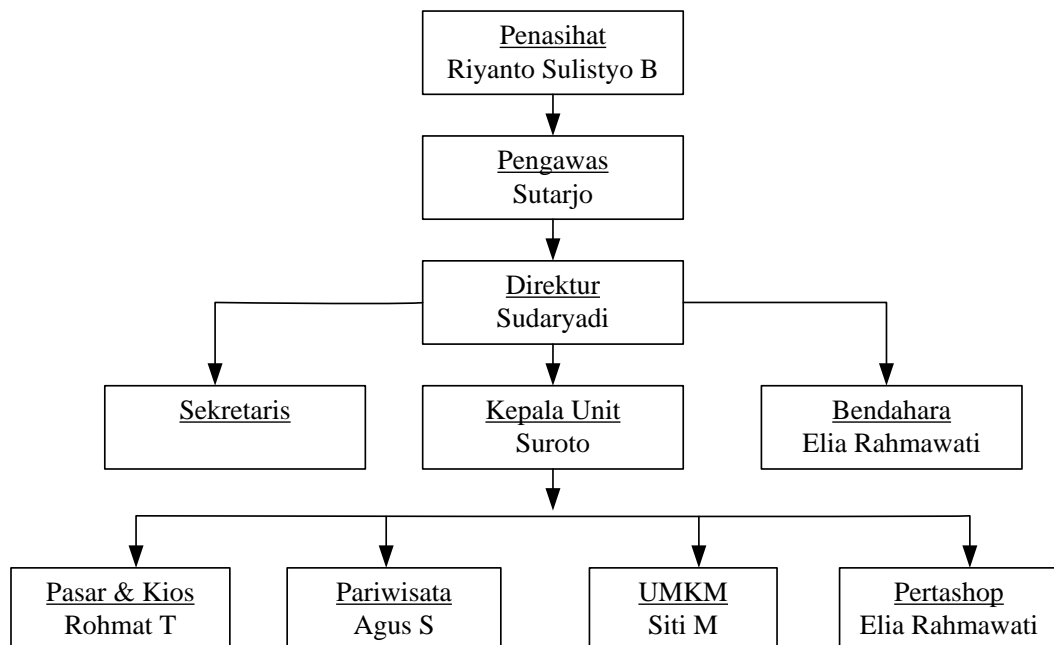
*Sumber Data: RPJMKal Wonokerto 2022-2027*



Demi keberlangsungan pemerintahan yang baik (*good governance*) BPD sebagai wakil kelompok masyarakat memiliki peran penting yaitu sebagai penampung dan aktor penyalur aspirasi masyarakat memiliki peran penting yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah Kalurahan serta mengawasi dan memberi evaluasi terhadap proses pemerintahan di Wonokerto.

### **Bagan Struktur Organisasi BUMKal “DHARMA UTAMA”**

#### **Kalurahan Wonokerto**



*Sumber Data: Data Kalurahan Wonokerto Tahun 2023*

Pemerintah Kalurahan BPKal harus pembinaan dan pengawas pengurus BUMKal dalam perencanaan pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Maka dengan itu, Tujuan didirikan lembaga BUMKal untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, modal BUMKal berasal dari Pemerintah Kalurahan; Tabungan masyarakat; Bantuan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; Pinjaman dan Kerjasama usaha dengan pihak lain. Guna memberdayakan masyarakat Desa lebih sejahtera.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dikalurahan Wonokerto Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta , dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada 3 upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto untuk menghidupkan kembali BUMKal Dharma Utama. Upaya pertama adalah melalui musyawarah mufakat Kalurahan sehingga membentuk pengurus baru. Upaya kedua adalah memberikan kewenangan pada ketua untuk membuat program serta membentuk anggota pengurus. Adapun upaya ketiga adalah memberikan kewenangan pada BUMKal Dharma Utama pengelolaan segala unit usaha dan potensi-potensi di Kalurahan Wonokerto.
2. Proses komunikasi dilakukan dengan menciptakan perantara. Dalam hal ini, perantara utama dari pemerintah kalurahan dalam upaya menghidupkan kembali BUMKal Dharma Utama yang telah vakum lama adalah dukuh dan ketua RT. Perantara informasi tersebut dalam implementasinya dilakukan saat sosialisasi. Ada 2 informasi utama yang diberikan oleh dukuh dan ketua RT pada saat sosialisasi yaitu pembentukan ulang BUMKal dan program- program yang akan dilakukan.

3. Kebijakan utama BUMKAl Dharma Utama adalah sebagai berikut:
  - a. Seluruh kebijakan yang dilakukan oleh BUMKAl menggunakan 4 konsep utama yaitu adanya peningkatan kehidupan dalam masyarakat, menciptakan keadilan, memberikan peluang masyarakat untuk aktif berpartisipasi, serta menjamin adanya pengembangan yang berkelanjutan. Saat ini kebijakan dari Pemerintah Wonokerto kepada BUMKAl Dharma Utama adalah kebijakan yang membebaskan.
  - b. AD/ART BUMKAl Dharma Utama berfokus pada teknis mengelola organisasi dan bisnisnya, ketentuan tentang keanggotaan, hingga berbagai hal yang terkait dengan pembubaran serta peraturan khusus lainnya. AD BUMKAl Dharma Utama terdiri atas 6 bab yaitu nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan, dan penutup, sedangkan ART terdiri atas 5 bab, yaitu Bab I mengatur mengenai organisasi, Bab II mengatur mengenai jenis usaha, Bab III, Bab IV mengatur tentang perubahan ART, serta Bab V mengatur mengenai ketentuan penutup.

## **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi, peneliti telah menganalisis dan menarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan data- data yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dari itu, peneliti akan memberikan saran kepada pemerintah Kalurahan Wonokerto, pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan Dharma Utama Wonokerto dan juga masyarakat.

1. Diharapkan kepada pemerintah Kalurahan Wonokerto agar tetap mengawasi kinerja pengurus BUMKAl dan juga selalu memberikan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan maupun pelaporan keuangan dan kegiatan. Selain itu, pemerintah Kalurahan harus juga memberikan dukungan berupa suntikan dana kepada pengurus BUMKAl agar selalu memunculkan inovasi- inovasi selama mengelola BUMKAl untuk satu periode ini.
2. Kepada pengurus BUMKAl diharapkan tetap melakukan pemetaan potensi untuk dijadikan sebagai unit usaha yang baru dan dilakukan dengan benar agar tidak merugikan pemerintah maupun masyarakat pada saat terlibat dalam pengelolaan unit usaha BUMKAl. Selain itu BUMKAl juga harus bekerja dengan setiap desa wisata yang ada di Kalurahan Wonokerto sebagai mitra maupun dimasukkan dalam unit usaha BUMKAl.
3. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap pengelolaan baik itu sebagai pelaku usaha maupun jasa penyewa di setiap unit usaha BUMKAl. Kemudian masyarakat pun harus terlibat dalam setiap pemetaan potensi di Kalurahan Wonokerto yang dapat juga menguntungkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan:

UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa Pasal 87, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan Bab V Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pasal 26

UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa Pasal 87, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa.

Pendirian BUMDesa sebagaimana disebut dalam Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,

Agusta, I. (2003). *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi*. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10).

Aisyah, N., & Giovanni, A. (2018). *Pengaruh Proses Rekrutmen (Porek) dan Seleksi terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Maya Pada Internasional*, Tbk. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 1(2), 8-18.

BUMDESA (*Permasalahan dan Solusi*) Sumber : <https://adikarso.kec.kebumen.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/336>.

Etikawati, E., & Udjang, R. (2016). *Strategi rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan*. *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis*, 4(1).

Firman, F. (2020). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39-52.

Ginting, B. O. (2020). *Tinjauan Yuridis Tentang Kerjasama Pemerintahan Desa Dengan Pihak Ketiga di Desa Jeraya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS QUALITY)

- Irawan, A. (2019). *Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten/kota ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Yuridis Unaja, 1(2), 55-67.
- Ismanto, D., Mudayana, A. A., Diana, P. Z., Erviana, V. Y., & Suwartini, I. (2022). *Pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Catur Sejahtera Berbasis*
- Lestari, N., Setiawan, S., Gunawan, Y., En, T. K., & Tin, S. (2021). *Proses dan Hasil Rekrutmen Sumber Daya Manusia pada BUMDesa Rancabango Garut*. SULUH: Jurnal Abdimas, 2(2), 117-127
- Lotulong, F. J., & Uhing, Y. (2018). *Pengaruh Rekrutmen, Kriteria Seleksi, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Bank Bri Tbk Manado)*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 6(4).
- Musung, P. V., Ruru, J., & Londa, V. Y. (2018). *Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)*. Jurnal Administrasi Publik, 4(63).
- Nim, E. S. *Pelaksanaan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Dengan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah*. Jurnal Fatwa Hukum, 1(3).
- Nur, A. C., Akib, H., & Niswaty, R. (2022). *Eksistensi Administrasi Publik Pada Arus Globalisasi*. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/22580>
- Paoki, D. G. (2018). *Pentingnya rekrutmen dan seleksi untuk mengukur kinerja karyawan*. Jurnal Manajemen: Untuk Ilmu Ekonomi dan Perpustakaan, 3(2).
- Pariyanti, E. (2019). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*. Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 2(2).
- Pranata, A. W. F. D. (2014). *Motivasi dan disiplin kerja pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada bidang pendaftaran dan informasi penduduk di dinas kependudukan dan catatan sipil kota bekasi jawa barat*. In Seminar Nasional" Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014". Universitas Islam Batik Surakarta.
- Purnomo, D. *Pelaksanaan Pasal 53 PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Hubungannya Dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,*

*Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 1(1).*

- Putri, L. S. (2016). *Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation)*. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2), 161-176.
- Rahman, A. (2015). *Peranan Badan USAha Milik Desa (BUMDesa) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BUMDesa Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*. Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, 2(1).
- Rosento, R. S. T. (2018). *Efektivitas Rekrutmen dalam Kinerja Karyawan Pada Bagian Pemasaran di CV Ikra Cendana Lintang Jakarta*. Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika, 18(1), 81-87.
- Sugiman, S. (2018). *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95.
- Sundarti, S., & Dekanawati, V. (2020). *Analisis Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan Kru Terhadap Kinerja Kru Kapal di PT. MCS Internasional Jakarta*. Majalah Ilmiah Bahari Jogja, 18(1), 14-22.
- Sunarsi, D. (2018). *Pengaruh rekrutmen, seleksi dan pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan*. Kreatif: Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang, 6(1), 14-31.
- Wijayanto, D. E. (2014). *Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*. Jurnal Independent, 2(1), 40-50.
- Yanto, R. B. A., & Sitio, V. S. S. (2020). *Pengaruh Rekrutmen, Seleksi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PT. Kingfood Bekasi*. Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen, 1(1), 1-14.
- YASIN FEBRIAN, L. E. V. I. (2018). *Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsinya (Studi Kasus Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Periode 2013-2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa Pasal 87, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa.
- Pendirian BUMDesa sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,